

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI SERBA USAHA ABDI NEGARA (KSUAN) PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG

Oleh:

DEWI SUPRIATY LUBIS

NPM : 07 840 0042

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang keberadaan sebuah badan hukum koperasi di dalam hal melakukan usahanya berupa pinjam meminjam uang khususnya di Koperasi Serba Usaha Abdi Negara (KSUAN) di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: bagaimana kedudukan badan hukum koperasi dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang dan bagaimana akibat hukum jika salah satu pihak baik itu koperasi atau anggota tidak memenuhi perjanjian pinjam meminjam uang yang disepakatinya.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada Koperasi Serba Usaha Abdi Negara (Ksuan) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peningkatan kesejahteraan anggota Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Propinsi Sumatera Utara dilakukan melalui pelaksanaan pemberian kredit. Pelaksanaan pemberian kredit kepada anggota Koperasi selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada anggotanya juga sebagai suatu bentuk usaha dari koperasi yang bersangkutan sehingga dengan demikian dari hasil usaha tersebut dapat di tindak lanjuti kemajuan koperasi tersebut. Pertanggung-jawaban atas aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh suatu koperasi dipegang oleh pengurus-pengurus koperasi tersebut. Pengurus-pengurus suatu koperasi tersebut yang bertindak atas nama dan untuk segala aktivitas koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian apabila dimintakan pertanggung-jawaban suatu koperasi maka pengurus mewakili koperasi sebagai suatu badan hukum. Selain hal tersebut dapat juga diperlakukan sistem perwakilan. Dimana koperasi melalui pengurusnya memberikan kuasa kepada seseorang untuk bertindak dan atas nama dari koperasi tersebut. Biasanya dalam hal ini adalah seorang kuasa hukum.

Pada penelitian disarankan agar pembangunan ekonomi dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat di dalam meningkatkan wadah potensial ekonomi masyarakat terutama anggota Koperasi Karya Bakti Nusantara, maka hendaknya pengurus Koperasi Serba Usaha Abdi Negara Propinsi Sumatera Utara harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta harus mendapat penerangan dan bimbingan dari instansi terkait.